



BerAKHLAK
Berakhlak Berprestasi

**#bangga
melayani
bangsa**

BENDAN
Pekalongan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

Jl. Sriwijaya No. 2
Kota Pekalongan,
Provinsi Jawa Tengah
51119



(0285) 437222



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Riset dan Inovasi (BSRI) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



rsudbendan.pekalongankota@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga RSUD Bendan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2025 ini merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Bendan Kota Pekalongan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di Lingkungan RSUD Bendan Kota Pekalongan.

Kami sangat berharap agar LKjIP Tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang nantinya akan diperoleh umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi RSUD Bendan Kota Pekalongan serta dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat menjadi bahan masukan dan saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, efektif dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Pekalongan, Februari 2026

Direktur RSUD Bendan
Kota Pekalongan



dr. DWI HERI WIBAWA, M.Kes

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2025. RSUD Bendan pada tahun 2025 memiliki 3 (tiga) program dengan total 5 (lima) sasaran program dan 5 (lima) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di RSUD Bendan pada tahun 2025 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan RSUD Bendan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja program yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD Bendan Tahun 2025.

Kinerja keuangan RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 119.742.198.776,00 atau 95,75% dari total pagu anggaran sebesar Rp 125.054.331.000,00. Capaian kinerja RSUD Bendan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	III
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	2
1.3 KONDISI APARATUR.....	8
1.4 SARANA DAN PRASARANA.....	8
1.5 ISU STRATEGIS.....	10
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026.....	12
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	15
AKUNTABILITAS KINERJA	
 BAB III 3.1 PENGUKURAN KINERJA.....	17
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	20
3.3 CAPAIAN KINERJA PELAYANAN.....	27
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	31
3.5 PRESTASI YANG DIRAIH.....	33
 BAB IV PENUTUP.....	38
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LKjIP RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kerja tahun 2025. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 RSUD Bendan Kota Pekalongan adalah:

1. Mengetahui pencapaian kinerja program RSUD Bendan Kota Pekalongan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.
2. Sebagai acuan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam peningkatan kinerja.
3. Sebagai bukti pertanggungjawaban akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu juga menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja RSUD Bendan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam laporan ini, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.2.1 Deskripsi RSUD Bendan

Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan memiliki beberapa poin penting antara lain mengubah fokus dari pengobatan menjadi pencegahan, mempermudah akses layanan kesehatan, mempersiapkan sistem kesehatan yang tangguh menghadapi bencana, meningkatkan efisiensi dan transparansi pembiayaan kesehatan, melindungi tenaga kesehatan. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang diorganisir oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

RSUD Bendan Kota Pekalongan sebagai lembaga teknis daerah memiliki peran memberikan pelayanan kesehatan rujukan, selalu berupaya mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perubahan Ketiga Renstra RSUD Bendan Kota Pekalongan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021-2026 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya indeks keluarga sehat.

Pada tahun 2025 merupakan tahun kelima implementasi dari Renstra RSUD Bendan Kota Pekalongan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021-2026 yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi “Menjadi rumah sakit umum daerah yang mandiri, inovatif, berkualitas dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian”.

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, maka kualitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana rumah sakit, peralatan kesehatan serta inovasi layanan semakin ditingkatkan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan.

Untuk mewujudkan Paradigma Sehat sebagai paradigma pembangunan kesehatan yang baru, telah dirumuskan Tujuan Pembangunan Kesehatan Kota Pekalongan yaitu **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”** Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut RSUD Bendan mempunyai visi, misi serta kebijakan mutu sebagai berikut :

1. Visi

Visi RSUD Bendan Kota Pekalongan adalah “Menjadi rumah sakit umum daerah yang mandiri, inovatif, berkualitas dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi RSUD Bendan Kota Pekalongan yaitu :

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan yang paripurna, bermutu dan terjangkau kepada semua lapisan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan;
- c. Menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang independen, akuntabel, disiplin, profesional dan inovatif;
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang bermutu untuk mendukung peningkatan pelayanan.

3. Kebijakan Mutu

- ✓ Bekerjasama memberikan pelayanan yang cepat dan tepat;
- ✓ Empati dalam melayani pelanggan;
- ✓ Netral tidak membedakan pelayanan;
- ✓ Disiplin dan selalu mengikuti persyaratan yang berlaku;
- ✓ Aman dalam pelayanan;
- ✓ Nyaman bagi pelanggan internal & eksternal;

- ✓ **I**nformatif dan terbuka;
- ✓ **O**rientasi pada pelanggan;
- ✓ **V**isioner dalam mengedepankan pelayanan publik;
- ✓ **A**kuntabel dalam penyajian laporan;
- ✓ **T**eknologi Informasi untuk mempermudah pelayanan;
- ✓ **F**asilitas yang lengkap dan unggul

Sesuai Misi 7 dalam RPJMD, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Government* dan *Clean Government*, RSUD Bendan Kota Pekalongan juga memiliki arah kebijakan antara lain:

- a. Meningkatkan implementasi SOP Pelayanan Publik dalam mendukung capaian Kinerja.
- b. Meningkatkan dukungan administrasi Perkantoran.
- c. Meningkatkan dukungan ketercukupan sarpras Aparatur.
- d. Optimalisasi penyusunan perencanaan program kegiatan.
- e. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
- f. Penerapan system pengendalian internal pemerintahan.
- g. Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan publik.
- h. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan rujukan yang berorientasi pasien safety.

Program yang telah ditetapkan, selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan tahunan.

1.2.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Direktur mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan sasaran dan program bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;

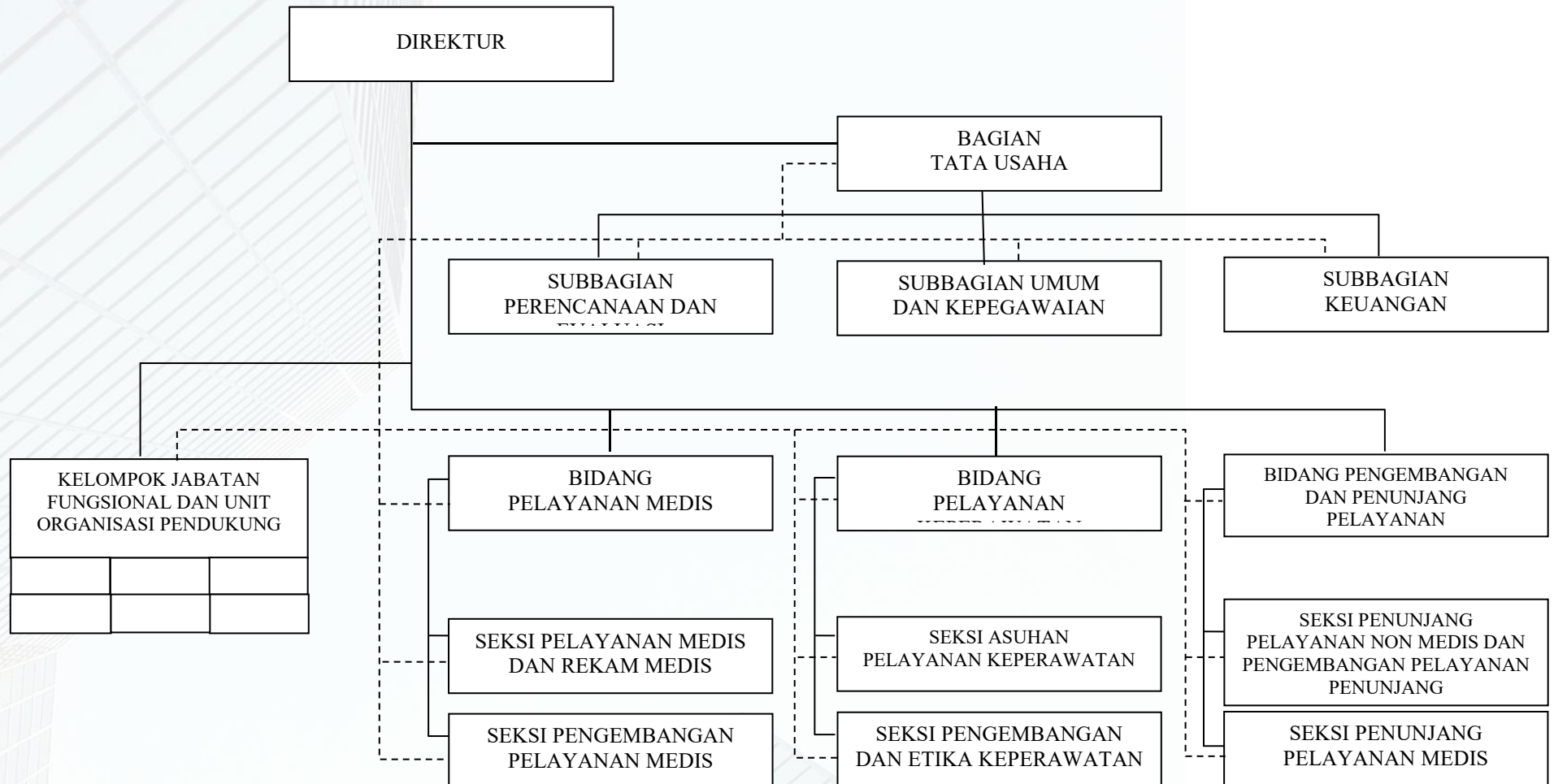
- b. perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
- c. perumusan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan rujukan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan meliputi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. pengendalian manajemen rumah sakit dan manajemen mutu rumah sakit;
- f. penyelenggaraan pelayanan medis, rekam medis dan pengembangan pelayanan medis;
- g. penyelenggaraan pelayanan keperawatan, pengembangan pelayanan keperawatan dan etika keperawatan;
- h. penyelenggaraan penunjang pelayanan medis dan non medis;
- i. penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- j. penyelenggaraan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- k. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- l. penyelenggaraan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, rumah tangga, perlengkapan dan umum serta teknologi informasi;
- m. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit;
- n. pengoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi RSUD Bendan Kota Pekalongan terdiri dari :

- 1) Direktur
- 2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b) Subbagian Keuangan
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Pelayanan Medis terdiri dari :
 - a) Seksi Pelayanan Medis dan Rekam Medis
 - b) Seksi Pengembangan Pelayanan Medis
- 4) Bidang Pelayanan Keperawatan , terdiri dari :
 - a) Seksi Asunan Pelayanan Keperawatan
 - b) Seksi Pengembangan dan Etika Keperawatan
- 5) Bidang Pengembangan dan Penunjang Pelayanan terdiri dari :
 - a) Seksi Penunjang Pelayanan Non Medis dan Pengembangan Pelayanan Penunjang
 - b) Seksi Penunjang Pelayanan Medis
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Unit Organisasi Pendukung

Gambar 1.2.1 Struktur Organisasi
RSUD Benda Kota Pekalongan



1.3 KONDISI APARATUR

Jumlah pegawai RSUD Bendan Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 650 orang dengan perincian sebagai berikut :

- PNS : 202 orang
- PPPK : 16 orang
- PPPK Paruh Waktu : 285 orang
- Tenaga BLUD : 132 orang
- Orientasi : 7 orang
- Mitra : 8 orang
- Jumlah (Total) : 650 orang

1.4 SARANA DAN PRASARANA

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, RSUD Bendan memiliki sarana dan prasarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan prasarana yang dirinci sesuai dengan jenis pelayanan sebagai berikut :

1) Pelayanan yang disediakan

1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).
2. Pelayanan Instalasi Rawat Inap
 - a. Ruang Buketan, digunakan untuk rawat inap penyakit dalam dan ruang isolasi.
 - b. Ruang Jlamprang, digunakan untuk rawat inap bedah
 - c. Ruang Sekar Jagad, ruang rawat inap anak
 - d. Ruang Truntum, ruang rawat penyakit dalam
 - e. Ruang Terang Bulan, digunakan untuk ruang rawat inap VIP dan VVIP
 - f. Ruang VK Nifas, ruang perawatan kebidanan dan kandungan
 - g. Ruang Perinatologi, ruang perawatan bayi
 - h. Pelayanan Intensive Care (ICU/ICCU/PICU/NICU)

Adapun untuk jumlah tempat tidur dan kapasitas pasien dari masing-masing ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4.1
Jumlah tempat tidur dan Kapasitas Pasien

No.	Nama Ruangan	Kelas					Total
		VVIP	VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III	
1	Terang Bulan	1	10				11
2	Truntum			8	8	24	40
3	Sekarjagad			6	6	22	34
	Isolasi Sekarjagad			2			2
4	Jlamprang			12	12	16	40
5	Nifas			1	2	9	12
6	Perinatologi				6		6
7	Perawatan Intensif						2
	a.ICU/ICCU dengan ventilator			9			9
	b.ICU/ICCU non ventilator			0			0
	c.PICU dengan ventilator			2			2
	d.PICU non ventilator			0			0
	e.NICU dengan ventilator			6			6
	f. NICU non ventilator			0			0
	g.ICU Isolasi dengan ventilator			2			2
	h. ICU Isolasi non ventilator			0			0
8	Isolasi Buketan			17			17
9	Ruang Transit					8	8
Total		1	10	65	34	79	189

3. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

- a. Klinik Umum
- b. Klinik Gigi dan Mulut
- c. Klinik DOTS
- d. Klinik VCT/CST

4. Klinik Spesialis/SubSpesialis : anak, bedah umum, bedah orthopedi, bedah syaraf, bedah digestive, bedah mulut, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, mata, syaraf, THT, kesehatan jiwa, jantung, paru, kulit dan kelamin dan klinik eksekutif Parikesit.

5. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral

6. Pelayanan Penunjang : laboratorium patologi klinik, laboratorium patologi anatomi, radiologi, hemodialisa, rekam medik, kateterisasi jantung (cathlab), rehabilitasi medik, psikologi, farmasi, gizi, CSSD, laundry, IPSRS, BDRS, ambulans, pemulasaraan jenazah, IPAL dan IT.

2) Pelayanan unggulan

- a) Klinik Spesialis Mata
- b) Klinik Spesialis Orthopedi
- c) Klinik Spesialis Rehab Medik
- d) Klinik Spesialis Jantung

3) Pelayanan yang dirujuk

Pelayanan rawat inap pasien dengan gangguan jiwa dan penyalahgunaan narkoba.

4) Pelayanan yang diberikan oleh praktisi independen

Pemeriksaan Radiologi

- CT Scan, MRI

1.5 ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja RSUD Bendan Kota Pekalongan tahun 2021-2026 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, SPM) maka indikator yang belum tercapai dan menjadi isu strategis adalah sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya angka kematian pasien >48 jam pada instalasi rawat inap. Adapun faktor penyebab kompleks seperti kondisi pasien yang berbeda-beda sehingga sulit dikendalikan.
- 2) Masih adanya BBLR yang belum tertangani. Adapun faktor penyebabnya antara lain masih kurangnya sitem rujukan BBLR sehingga rata-rata rujukan BBLR dari rumah sakit lain dengan kondisi kurang baik, tidak memiliki surfaktan dan penyebab lainnya.
- 3) Masih kurangnya tenaga kesehatan dan penunjang dalam pemenuhan pelatihan kompetensi seperti pelatihan ICU serta PPI lanjut.
- 4) Masih kurangnya sarana, prasarana pendukung pelayanan kesehatan baik sarana medis, sarana penunjang pelayanan medis dan non medis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu

dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ *deployment/cascading* dari program serta tugas dan fungsi RSUD Bendan.

Tabel 2.1.1 Matriks Perencanaan Kinerja pada
RSUD Bendan Tahun 2025

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program/Kegiatan	Indikator	Target 2025
VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius	-	-
Misi Ke-1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-
Tujuan Kota : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	-
Tujuan Dinas Kesehatan 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	-	-
Sasaran Dinas Kesehatan 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	-
Program RSUD Bendan 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program/Kegiatan	Indikator	Target 2025
Kab/Kota	2. Presentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 3. Presentase ketersediaan layanan BLUD	
Kegiatan RSUD Bendan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
Kegiatan RSUD Bendan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%
Kegiatan RSUD Bendan 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 %
Kegiatan RSUD Bendan 4 : Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD	100 %
Tujuan Dinas Kesehatan 2 : Meningkatkan Indeks Keluarga Sehat	-	-
Sasaran Dinas Kesehatan 2 : Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	-	-
Program RSUD Bendan 2 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	92%
Kegiatan RSUD Bendan 5 : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%
Kegiatan RSUD Bendan 6 : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Presentase layanan RS tipe C	100%
Kegiatan RSUD Bendan 7 : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan	100%
Program RSUD Bendan 3 : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%
Kegiatan RSUD Bendan 8 : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase perawat dan bidan yang terakreditasi	100%
Kegiatan RSUD Bendan 9 : Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perawat/bidan yang bersertifikat pelatihan pengembangan kompetensi	100%

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.2.1

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 RSUD Bendan Kota Pekalongan

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program :				
1	Tersedianya laporan capaian kinerja	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	Formulasi : Persentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah + Persentase capaian kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dibagi 2 Tipe capaian : Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : RSUD Bendan
2	Tersedianya layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum	100 persen	Formulasi : Persentase capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tipe capaian : Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik

	penunjang urusan pemerintah daerah	dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Sumber data : RSUD Bendan
3	Tersedianya layanan BLUD	Presentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	Formulasi : Persentase capaian kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Tipe capaian : Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : RSUD Bendan
4	Tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	Presentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	100 persen	Formulasi : Jumlah sarpras dan alkes yang tersedia dan sesuai standar dibagi jumlah seluruh sarpras dan alkes yang tersedia dikali 100 Tipe capaian : Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : RSUD Bendan
5	Tersedianya tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	Presentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	100 persen	Formulasi : Jumlah tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dibagi jumlah seluruh tenaga kesehatan di RSUD Bendan dikali 100 Tipe capaian : Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : RSUD Bendan

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 110.527.158.000	APBD dan BLUD
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 14.476.792.000	APBD dan DAK
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 50.3819.000	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

RSUD Bendan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Bendan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

- **Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya**
Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

- **Arahan Operasional**
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.
- **Akuntabilitas**
Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
- **Perencanaan**
Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
- **Pengelolaan**
Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.
- **Penganggaran**
Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.
- **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**
Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.
- **Pengawasan Kerja**
Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja

SASARAN PROGRAM 1 : Tersedianya laporan capaian kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran program 1 mendapatkan angka nilai capaian sebesar 100% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Berikut adalah kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	ALASAN MENGAPA KEGIATAN TERSEBUT MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	11.997.000	- Dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdapat Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang salah satu indikatornya adalah kelengkapan dokumen SAKIP OPD - Dokumen SAKIP OPD yang lengkap memudahkan dalam proses penilaian dan evaluasi yang menentukan nilai SAKIP OPD
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.300.000	49.300.000	49.200.000	- Administrasi keuangan merupakan instrumen strategis dalam mendukung akuntabilitas kinerja OPD.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

KEGIATAN	EFISIENSI ANGGARAN	EFISIENSI SDM	EFISIENSI WAKTU
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Anggaran Rp 12.000.000 - Realisasi anggaran Rp 12.000.000 (100%) - Dari total anggaran menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program selaras dan berjalan sesuai perencanaan. Hal ini menunjukkan perencanaan yang bagus sesuai dengan kebutuhan.	Efisiensi SDM meningkat karena penggunaan media daring seperti <i>Whatsapp</i> grup memudahkan proses komunikasi dengan bidang/bagian lain.	Proses pengumpulan dokumen sudah dilakukan dari triwulan awal (sebagai bahan <i>evidence</i> penilaian kinerja triwulanan) sehingga memudahkan saat proses evaluasi.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Anggaran Rp 49.300.000 - Realisasi anggaran Rp 49.200.000 - Dari total anggaran menunjukkan adanya penghematan sebesar 0,20%	Efisiensi SDM meningkat karena penggunaan media daring seperti <i>Whatsapp</i> grup memudahkan proses komunikasi dengan petugas di Puskesmas	Proses pengumpulan dokumen sudah dilakukan dari triwulan awal (sebagai bahan <i>evidence</i> penilaian kinerja triwulanan) sehingga memudahkan saat proses evaluasi

Kesimpulan efisiensi :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berjalan dengan baik antara perencanaan dan realisasi sesuai.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh penghematan anggaran sebesar 0,20%.

SASARAN PROGRAM 2 : Tersedianya layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran program 2 mendapatkan angka nilai capaian sebesar 100% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Berikut adalah kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	ALASAN MENGAPA KEGIATAN TERSEBUT MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.526.000	1.013.000	1.013.000	- Terdapat kegiatan penyediaan prasarana dan sumber daya yang mendukung capaian nilai SAKIP

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

KEGIATAN	EFISIENSI ANGGARAN	EFISIENSI SDM	EFISIENSI WAKTU
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Anggaran Rp 1.013.000 - Realisasi anggaran Rp 1.013.000 - Dari total anggaran menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program selaras dan berjalan sesuai perencanaan. Hal ini menunjukkan perencanaan yang bagus sesuai dengan kebutuhan.	Efisiensi SDM meningkat karena penggunaan media daring seperti Whatsapp grup memudahkan proses komunikasi dengan bidang/bagian lain.	Proses pengumpulan dokumen sudah dilakukan dari triwulan awal (sebagai bahan evidence penilaian kinerja triwulanan) sehingga memudahkan saat proses evaluasi

Kesimpulan efisiensi :

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan dengan baik antara perencanaan dan realisasi sesuai.

SASARAN PROGRAM 3 : Tersedianya layanan BLUD

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran program 3 mendapatkan angka nilai capaian sebesar 100% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Berikut adalah kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	ALASAN MENGAPA KEGIATAN TERSEBUT MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	103.100.000.000	110.464.845.000	105.245.392.460	

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

KEGIATAN	EFISIENSI ANGGARAN	EFISIENSI SDM	EFISIENSI WAKTU
Peningkatan Pelayanan BLUD	- Anggaran Rp 110.464.845.000 - Realisasi anggaran Rp 105.245.392.460 - Dari total anggaran menunjukkan adanya penghematan sebesar 4,72%	Efisiensi SDM meningkat karena penggunaan media daring seperti Whatsapp grup memudahkan proses komunikasi dengan bidang/bagian lain.	Proses pengumpulan dokumen sudah dilakukan dari triwulan awal (sebagai bahan evidence penilaian kinerja triwulanan) sehingga memudahkan saat proses evaluasi

Kesimpulan efisiensi :

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh penghematan anggaran sebesar 4,72%.

SASARAN PROGRAM 4 : Tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran program 4 mendapatkan angka nilai capaian sebesar 100% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Berikut adalah kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	ALASAN MENGAPA KEGIATAN TERSEBUT MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.750.000.000	14.395.453.000	14.303.353.360	Ketersediaan sarana prasarana dan alkes yang memadai memudahkan dalam memberikan pelayanan kesehatan
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.109.000	21.109.000	20.949.000	Pemberian layanan kesehatan sesuai standar akan meningkatkan pelayanan kesehatan dan SPM Rumah Sakit
Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.230.000	60.230.000	59.940.100	Penerbitan izin rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan akan meningkatkan akses dan penjaminan mutu layanan kesehatan

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

KEGIATAN	EFISIENSI ANGGARAN	EFISIENSI SDM	EFISIENSI WAKTU
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	- Anggaran Rp 14.395.453.000 - Realisasi anggaran Rp 14.303.353.360 (99,36%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya penghematan sebesar 0,64%. - Terlihat bahwa perencanaan dan pelaksanaan program selaras dan berjalan sesuai perencanaan. Hal ini menunjukkan perencanaan yang bagus sesuai dengan kebutuhan.	Efisiensi SDM meningkat karena penggunaan media daring seperti <i>Whatsapp</i> grup memudahkan proses komunikasi dengan bidang/bagian lain.	Proses pengumpulan dokumen sudah dilakukan dari triwulan awal (sebagai bahan <i>evidence</i> penilaian kinerja triwulanan) sehingga memudahkan saat proses evaluasi.
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	- Anggaran Rp 21.109.000 - Realisasi anggaran Rp 20.949.000 (99,24%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya	Efisiensi SDM meningkat karena penggunaan media daring seperti <i>Whatsapp</i> grup	Proses pengumpulan dokumen sudah dilakukan dari triwulan awal (sebagai bahan <i>evidence</i> penilaian kinerja triwulanan) sehingga

KEGIATAN	EFISIENSI ANGGARAN	EFISIENSI SDM	EFISIENSI WAKTU
Daerah Kabupaten/Kota	penghematan sebesar 0,76%. - Terlihat bahwa perencanaan dan pelaksanaan program selaras dan berjalan sesuai perencanaan. Hal ini menunjukkan perencanaan yang bagus sesuai dengan kebutuhan.	memudahkan proses komunikasi dengan petugas di Puskesmas	memudahkan saat proses evaluasi
Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Anggaran Rp 60.230.000 - Realisasi anggaran 59.940.100 (99,52%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya penghematan sebesar 0,48%. - Terlihat bahwa perencanaan dan pelaksanaan program selaras dan berjalan sesuai perencanaan. Hal ini menunjukkan perencanaan yang bagus sesuai dengan kebutuhan.	Efisiensi SDM meningkat karena penggunaan media daring seperti Whatsapp grup memudahkan proses komunikasi dengan petugas di Puskesmas	Proses pengumpulan dokumen sudah dilakukan dari triwulan awal (sebagai bahan evidence penilaian kinerja triwulanan) sehingga memudahkan saat proses evaluasi

Kesimpulan efisiensi :

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh penghematan anggaran sebesar 0,64%.
2. Kegiatan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh penghematan anggaran sebesar 0,76%.
3. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh penghematan anggaran sebesar 0,48%.

SASARAN PROGRAM 5 : Tersedianya tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran program 5 mendapatkan angka nilai capaian sebesar 100% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Berikut adalah kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	ALASAN MENGAPA KEGIATAN TERSEBUT MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	38.571.000	38.571.000	38.543.856	Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan akan meningkatkan ketersediaan SDM kesehatan dalam pelayanan kesehatan
Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.810.000	11.810.000	11.810.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

KEGIATAN	EFISIENSI ANGGARAN	EFISIENSI SDM	EFISIENSI WAKTU
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	- Anggaran Rp 38.571.000 - Realisasi anggaran Rp 38.543.856 (99,93%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya penghematan sebesar 0,07%. - Terlihat bahwa perencanaan dan pelaksanaan program selaras dan berjalan sesuai perencanaan. Hal ini menunjukkan perencanaan yang bagus sesuai dengan kebutuhan.	Efisiensi SDM meningkat karena penggunaan media daring seperti <i>Whatsapp</i> grup memudahkan proses komunikasi dengan bidang/bagian lain.	Proses pengumpulan dokumen sudah dilakukan dari triwulan awal (sebagai bahan <i>evidence</i> penilaian kinerja triwulanan) sehingga memudahkan saat proses evaluasi.
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Anggaran Rp 11.810.000 - Realisasi anggaran Rp 11.810.000 (100%) - Dari total anggaran menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program selaras dan berjalan sesuai perencanaan. Hal ini menunjukkan perencanaan yang bagus sesuai dengan kebutuhan.	Efisiensi SDM meningkat karena penggunaan media daring seperti <i>Whatsapp</i> grup memudahkan proses komunikasi dengan petugas di Puskesmas	Proses pengumpulan dokumen sudah dilakukan dari triwulan awal (sebagai bahan <i>evidence</i> penilaian kinerja triwulanan) sehingga memudahkan saat proses evaluasi

Kesimpulan efisiensi :

1. Kegiatan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh penghematan anggaran sebesar 0,07%.

3. Kegiatan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota berjalan baik antara perencanaan dan realisasi sesuai.

3.3 CAPAIAN KINERJA PELAYANAN

Perkembangan Kinerja RSUD Bendan Kota Pekalongan juga dapat dilihat dari sisi pelayanan kesehatan rujukannya, baik dari pelayanan rawat jalan maupun rawat inap dengan uraian sebagai berikut :

1. Pelayanan Rawat Jalan

Jumlah kunjungan rawat jalan pada poliklinik di RSUD Bendan Kota Pekalongan tahun 2021-2024 terus mengalami peningkatan. Tren kunjungan pasien rawat jalan tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.1

Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Pelayanan Tahun 2023-2025

No	Poliklinik	2023	2024	2025
1	Anak	6.328	7.455	7.289
2	Bedah	5.779	6.597	6.774
3	Bedah Digestif	2.118	738	-
4	Bedah Mulut	3.269	4.562	5.445
5	Bedah Saraf	1.843	1.815	1.366
6	Gigi	5.055	2.218	217
7	Jantung	11.511	14.338	16.087
8	Jiwa	5.037	4.480	4.660
9	Kebidanan / Kandungan	3.473	2.406	3.033
10	Mata	17.781	14.664	16.158
11	Orthopedi	5.260	8.218	5.269
12	Penyakit Dalam	13.884	12.247	14.454
13	Penyakit Paru	4.518	6.689	3.737
14	Rehabilitasi Medik	19.180	18.693	20.723
15	Saraf	12.340	15.266	11.172
16	THT	3.410	5.619	3.411
17	Umum parikesit	3.611	3.514	3.192
18	Kulit	2.935	3.792	3.448
19	CST	1.310	1.335	1.259
20	DOTS	887	739	324
21	VCT	32	34	15
	Total	129.561	135.419	128.033

Pada tahun 2024 jumlah pasien rawat jalan mengalami peningkatan yang signifikan. Namun pada tahun 2025 jumlah pasien mengalami penurunan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh berkurangnya beberapa pelayanan seperti pelayanan poliklinik bedah digestif serta adanya kebijakan tidak tertulis dari pemerintah kabupaten yang melarang merujuk pasien ke RSUD Kota.

2. Pelayanan Rawat Inap

Jumlah kunjungan rawat inap di RSUD Bendan Kota Pekalongan tahun 2023-2025 masih fluktuatif. Tren kunjungan pasien rawat inap tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.2

Kunjungan Rawat Inap Tahun Berdasarkan Ruang Perawatan
Tahun 2023-2025

No.	Ruang Perawatan	Kelas Perawatan	2023	2024	2025
1.	Jlamprang	I, II, III	3.495	3.461	3.796
2.	Truntum	I,II,III	2.893	3.368	3.662
3.	Sekar Jagad	I, II, III	2.766	2.933	2.964
4.	Terang Bulan	VVIP, VIP	840	846	873
5.	ICU	-	207	218	260
6.	Buketan	III, Isolasi	1.415	1.415	1.381
7.	Nifas	I, II, III	1.710	1.196	1.100
8.	Perinatal	-	1.081	533	732
9.	Transit	-	-	-	307
Total			14.407	13.970	15.075

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 jumlah pasien mengalami peningkatan, Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas RSUD Bendan yang membuat masyarakat lebih percaya dan memilih RSUD Bendan untuk rawat inap serta didukung oleh kemudahan akses layanan melalui program pemerintah (seperti UHC) yang mempermudah akses layanan kesehatan, sehingga jumlah pasien rawat inap meningkat.

3. Indikator Capaian Pelayanan

Indikator Pelayanan Rawat Inap dapat dilihat dari pencapaian BOR, LOS TOI, BTO, GDR dan NDR. Capaian indikator pelayanan rawat inap berdasarkan rekapitulasi sensus harian rawat inap tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.3

Indikator Pelayanan Rawat Inap RSUD Bendan Tahun 2025

Bangsas	Hari Rawat	Lama Rawat	BOR	LOS	TOI	BTO	GDR	NDR
Jlamprang	12793	14507	87,62	3,8	0,5	94,9	33,46	22,39
Truntum	13532	15155	92,68	4,1	0,3	91,6	39,32	16,38
Sekar Jagad	11781	13181	89,66	4,4	0,5	82,3	1,35	0,34
VIP-VVIP	3008	3485	74,92	4,0	1,2	79,4	17,18	5,73
ICU	3217	2314	46,39	8,9	14,3	13,7	919,23	615,38
Buketan	5469	6142	88,14	4,4	0,5	81,2	66,62	29,69
VK-Nifas	1950	2551	44,52	2,3	2,2	91,7	0,91	0,90909
Perinatal	1618	2041	73,88	2,8	0,8	122,0	6,83	1,36612
Sub Total	53368	59376	80,78	4,0	0,9	81,6	42,46	23,9707
Transit	1499	7936	51,34	25,9	4,6	38,4	465,80	0
Total	54867	67312	79,53	4,5	0,9	79,8	51,08	23,4826

a) BOR

BOR (*Bed Occupancy Ratio*) atau angka penggunaan tempat tidur memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal sesuai dengan Depkes RI Tahun 2005 adalah 60-85%.

Capaian BOR RSUD Bendan tahun 2025 sebesar 79,53. Angka capaian tersebut sudah ideal sesuai dengan nilai parameter yang telah ditetapkan Dinkes RI.

b) ALOS

ALOS (*Average Length of Stay*) atau rata-rata lama pasien dirawat memberikan gambaran tingkat efisiensi dan gambaran mutu pelayanan. Sesuai dengan Depkes RI tahun 2005 nilai ALOS yang ideal antara 6-9 hari.

ALOS pada RSUD Bendan tahun 2025 untuk rata-rata lama pasien dirawat adalah 4,5 hari. Angka ini masih belum mencapai target rumah sakit serta target ideal yang ditetapkan menurut Depkes RI tahun 2005 yaitu 6-9 hari.

Capaian ALOS RSUD Bendan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari aspek medis, semakin panjang nilai ALOS maka bisa menunjukkan kinerja kualitas medis yang kurang baik, karena pasien harus dirawat lebih lama. Sedangkan dari aspek ekonomis, semakin panjang nilai ALOS berarti semakin tinggi biaya yang nantinya harus dibayar oleh pasien. Di era BPJS ini, rumah sakit dituntut untuk efisien dalam penggunaan anggaran dengan adanya paket klaim BPJS berdasarkan tarif INA CBG's. Berbeda dengan pasien umum, semakin lama pasien BPJS dirawat, maka pengeluaran rumah sakit akan semakin membengkak, sedangkan paket penjaminan dari BPJS bersifat tetap.

c) NDR

NDR (Net Death Rate) atau angka kematian 48 jam setelah pasien dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit.

Angka kematian pasien lebih dari 48 jam pada RSUD Bendan tahun 2025 adalah 23,486‰. Angka tersebut sudah memenuhi angka ideal yang ditetapkan oleh Depkes RI tahun 2005 yaitu $\leq 25\text{‰}$.

d) GDR

GDR (Gross Death Rate) atau angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit, nilai parameter sesuai Depkes RI tahun 2005 adalah kurang dari 45 permil ($\leq 45\text{‰}$).

Nilai GDR pada RSUD Bendan pada tahun 2025 sebesar 51,08‰, hasil pengukuran belum mencapai standar ideal yang ditetapkan oleh Depkes RI.

Untuk mengatasi hal tersebut, RSUD Bendan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar pelayanan kepada pasien

secara cepat dan tepat dapat diberikan dengan pemenuhan kelengkapan sarana prasarana kesehatan dan sarana prasarana pendukung serta peningkatan kualitas SDM dengan mengadakan ataupun mengikuti pelatihan-pelatihan peningkatan skill tenaga kesehatan.

e) TOI (Turn Over Interval)

TOI (Turn Over Interval) adalah tenggang perputaran tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari (Depkes RI. 2005, Kementerian Kesehatan 2011). TOI RSUD Bendan 1 hari, artinya sudah memenuhi standar.

f) BTO (Bed Turn Over)

BTO (Bed Turn Over) adalah angka perputaran tempat tidur. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali (Depkes RI. 2005, Kementerian Kesehatan 2011). BTO RSUD Bendan 80 kali melampaui standar yang ada.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai RSUD Bendan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan BLUD. Pagu total belanja RSUD Bendan Tahun 2025 adalah sebesar Rp 125.054.331.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp 119.742.198.776,00 atau sebesar 95,75%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4.1

Pagu dan Realisasi Anggaran RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	100
2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	1.500.000	100
3			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	7.997.000	99,96
4		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.800.000	47.700.000	99,79
5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.500.000	100,00
6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.013.000	1.013.000	100,00
7		Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	110.464.845.000	105.245.392.460	95,28
8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.682.710.000	9.682.709.760	100,00
9			Pengembangan Rumah Sakit	3.962.743.000	3.962.742.600	100,00
10			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	140.400.000	138.601.000	98,72
11			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	609.600.000	519.300.000	85,19
12		Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	21.109.000	20.949.000	99,24
13		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	60.230.000	59.940.100	99,52
14	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	38.571.000	38.543.856	99,93
15		Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.810.000	11.810.000	100,00
TOTAL				125.054.331.000	119.742.198.776	95,75

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa anggaran program dan kegiatan RSUD Bendan Tahun 2025 sebesar Rp 125.054.331.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 119.742.198.776,00 atau sekitar (95,75%).

3.5 PRESTASI YANG DIRAIH

3.4.1 Prestasi RSUD Bendan

1. Penghargaan Peringkat 3 Badan Publik Informatif Pada Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.



Semarang, 16 Desember 2025, RSUD Bendan berhasil memperoleh peringkat 3 Badan Publik Informatif dalam Malam Anugrah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Awards Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melakukan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. RSUD Bendan berhasil melalui 4 tahap penilaian meliputi Monitoring Website dan Media Sosial, Penilaian SAQ Verifikasi Dokumen, Penilaian Visitasi Verifikasi Lapangan dan Presentasi serta Penilaian Uji Publik dan berhasil meraih peringkat 3 Rumah Sakit Daerah Informatif.

Penghargaan ini menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi informasi publik, serta inovasi dalam pengelolaan rumah sakit demi kepuasan masyarakat.

6. Penghargaan dari Badan Pengawasan Tenaga Nuklir dengan SKor Keselamatan diatas 90.

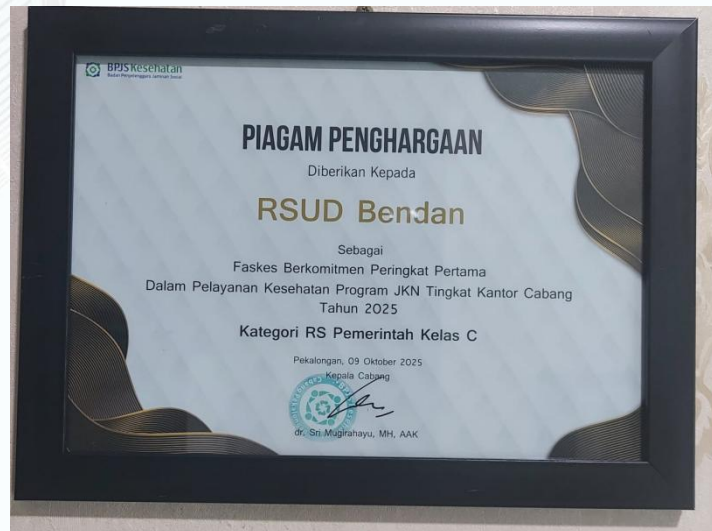
RSUD Bendan berhasil meraih Anugerah Bapeten Tahun 2025 sebagai apresiasi atas komitmen rumah sakit dalam menerapkan standar keselamatan dan keamanan nuklir yang ketat. Penghargaan ini mencakup aspek pemanfaatan radiasi pada layanan radiodiagnostik dan intervensional, di mana RSUD Bendan dinilai konsisten dalam menjalankan prosedur perlindungan radiasi bagi pasien, petugas, maupun lingkungan. Pencapaian ini membuktikan bahwa RSUD Bendan senantiasa mengedepankan aspek kepatuhan regulasi dan keamanan teknis dalam setiap tindakan medis, guna memastikan layanan kesehatan yang berkualitas dan aman bagi masyarakat.



Anugerah Bapeten adalah penghargaan tahunan yang diberikan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai bentuk apresiasi tertinggi kepada instansi atau fasilitas yang menunjukkan tingkat kepatuhan luar biasa terhadap peraturan perundang-undangan ketenaganukliran. Indikator Utama penilaian didasarkan pada Indeks Keselamatan dan Keamanan Nuklir (IKKN). Indeks ini mengukur performa fasilitas melalui hasil inspeksi lapangan, laporan keselamatan, pemantauan dosis radiasi pekerja, serta kelengkapan perizinan.

7. Penghargaan Juara 1 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) RS Tipe C Berkomitmen Melayani Pasien JKN Tahun 2025

RSUD Bendan Kota Pekalongan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Juara1 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) RS Tipe C Berkomitmen Melayani Pasien JKN Tahun 2025 dari Kantor Cabang BPJS Kesehatan Pekalongan.



8. Penghargaan Pada Festival Inovasi Daerah Kota Pekalongan

Pada Tahun 2025, Kota Pekalongan mengadakan Festival Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang diikuti oleh seluruh OPD di Kota Pekalongan. RSUD Bendan berhasil memperoleh 3 penghargaan yaitu Juara 1 Kategori Ide Inovasi untuk OPD, Juara 2 Kategori OPD Terinovatif dan Juara 3 Kategori Inovasi Aktif untuk OPD.





3.4.2 Inovasi di RSUD Benda

Pada Tahun 2025, RSUD Benda mengembangkan Inovasi-Inovasi baik inovasi pelayanan maupun inovasi administratif diantaranya :

1. Inovasi RAMAH (Registrasi Akta Mudah Antar sampai rumah)

Inovasi RAMAH (Registrasi Akta Mudah Antar sampai rumah) merupakan layanan pasca salin di RSUD Benda dimana ibu yang melahirkan di RSUD Benda akan sekaligus mendapatkan pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (Update), Kepesertaan BPJS (Update) dan Akte Kelahiran secara gratis yang bisa diantar sampai kerumah pasien.



2. Inovasi MONALISA (Monitoring Harian Air, Listrik dan Sanitasi)

“MONALISA (Monitoring Harian Air, Listrik dan Sanitasi) Terintegrasi Data Layanan”, yang diinisiasi oleh dr Rikza Dini, selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Penunjang Pelayanan di RSUD Bendan. Program ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi energi dan operasional serta penerapan prinsip Green Hospital melalui pemantauan dan analisis terintegrasi terhadap pemakaian listrik, air, dan utilitas lainnya yang dihubungkan dengan indikator layanan.



3. Inovasi SIBAJAK (Sistem Informasi Barang Jasa dan Keuangan)

SIBAJAK (Sistem Informasi Barang Jasa dan Keuangan) adalah sistem pengajuan pengadaan barang jasa dan keuangan dengan menggunakan aplikasi mulai dari pengajuan, persetujuan, sampai pembayaran sehingga memudahkan ruang/unit dalam melakukan pengadaan barang jasa.



BAB IV

PENUTUP

4.1 SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

RSUD Bendan Kota Pekalongan sebagai UOBK dari Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana, dan sarana secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan kegiatan di RSUD Bendan Kota Pekalongan pada tahun anggaran 2025 merupakan tahun ke-5 (lima) dari Rencana Strategis RSUD Bendan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Hasil capaian program pada RSUD Bendan Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- **Program 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
Target Indikator sasaran program berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 100% dengan kategori Sangat Berhasil.
- **Program 2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**
Presentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar mencapai 100%. Semua sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Tipe C).
- **Program 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**
Presentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan mencapai 100%. Kompetensi yang dipersyaratkan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023 Pasal 260 dan 263 yang mewajibkan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan memiliki STR dan SIP. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum baik untuk masyarakat sebagai penerima pelayanan, maupun Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.

4.2 PERMASALAHAN DAN LANGKAH KE DEPAN

Dari hasil capaian Program di atas, maka upaya yang akan dilakukan di masa mendatang adalah:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan agar pelayanan yang diberikan lebih optimal dan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sebagai upaya peningkatan capaian SPM Rumah Sakit yang lebih baik lagi.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja RSUD Benda Kota Pekalongan juga didukung dengan dana bersumber BLUD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Keuangan RSUD Benda Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
I	PENDAPATAN BLUD	103.100.000.000,00	108.363.731.615,00	105,11
	JASA LAYANAN	101.432.728.000,00	105.966.222.133,00	104,47
	Jasa Layanan Bidang Kesehatan	101.432.728.000,00	105.966.222.133,00	104,47
	HASIL KERJA SAMA	388.750.000,00	615.761.322,00	158,40
	Hasil Kerja Sama	388.750.000,00	615.761.322,00	158,40
	LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH	1.278.522.000,00	1.781.748.160,00	139,36
	Jasa Giro/Bunga	960.000.000,00	1.050.420.380,00	109,42
	Studi Banding	36.000.000,00	9.525.000,00	26,46
	Pendapatan Lain-Lain	282.522.000,00	721.802.780,00	255,49
II	BELANJA BLUD	110.464.845.000,00	105.245.392.460,00	95,28
	BELANJA OPERASI	108.664.845.000,00	103.708.349.788,00	95,44
	Belanja Pegawai	21.700.000.000,00	21.267.765.559,00	98,01
	Belanja Barang dan Jasa	86.964.845.000,00	82.440.584.229,00	94,80
	BELANJA MODAL	1.800.000.000,00	1.537.042.672,00	85,39
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000.000,00	1.360.087.522,00	90,67
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	176.955.150,00	58,99
SURPLUS / (DEFISIT)		-7.364.845.000,00	3.118.339.155,00	-42,34
III	PEMBIAYAAN DAERAH	7.364.845.000,00	7.364.845.687,00	100,00
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.364.845.000,00	7.364.845.687,00	100,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.364.845.000,00	7.364.845.687,00	100,00

Seperti yang dijelaskan pada tabel 3.14 diatas, realisasi pendapatan RSUD Bendan tahun 2025 yang bersumber dari dana BLUD sebesar Rp 108.363.731.615,00 melebihi target anggaran yang ditetapkan yaitu 105,11% dari target setelah perubahan dengan ambang batas sebesar Rp 103.100.000.000,00. Sedangkan realisasi belanja RSUD dari dana BLUD sebesar Rp 105.245.392.460,00 atau 95,28% dari anggaran setelah perubahan dengan ambang batas sebesar Rp 110.464.845.000,00. Sehingga dalam Laporan Realisasi Anggaran RSUD Bendan dana BLUD Tahun 2025 mengalami Surplus sebesar Rp 3.118.339.155,00.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2025, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang dan sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pekalongan, Februari 2026
Direktur RSUD Bendan
Kota Pekalongan



dr. DWI HERI WIBAWA, M.Kes

LAMPIRAN